

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBAGUNAN
Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta



LAPORAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
S.D. TRIWULAN I TAHUN 2022

PE11.03/ND-13/PW12/6/2022

8 APRIL 2022



Nomor : PE.11.03/ND-13/PW12/6/2022

8 April 2022

Lampiran : Empat Eksemplar

Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP
Daerah Istimewa Yogyakarta s.d.
Triwulan I Tahun 2022

Yth. Kepala Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
di tempat

Berikut kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. Triwulan I Tahun 2022.

1. Pencapaian Target *Outcome* sesuai Perjanjian Kinerja

a. Pengawasan

Sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2022, Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mempunyai 32 indikator kinerja kegiatan (IKK). Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

1) IKK: Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi

Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebesar Rp 0,00

Target IKK "Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi" pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp701.000.000,00. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 belum terdapat target maupun realisasi.

IKK "Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi" diukur dengan jumlah kurang bayar penerimaan daerah (pajak dan retribusi) yang sudah disetorkan/ditetapkan atas hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi" sebagai berikut:



2) IKK: Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi

Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebesar Rp 0,00

Target IKK “Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi” pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.394.490.000,00. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 belum terdapat target maupun realisasi.

IKK “Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi” diukur dengan jumlah selisih dari potensi penerimaan daerah dari hasil kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta dengan target yang dianggarkan oleh Daerah.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Potensi Penerimaan Daerah yang Dioptimalisasi” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



3) IKK: Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah

Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara/ Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebesar Rp 123.064.570.000,00

Target IKK “Nilai efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp154.478.000.000,00, dan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 adalah Rp 75.000.000.000,00. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp123.064.570.000,00 atau 164,09%

dari Target sebesar Rp 75.000.000.000,00, dan telah tercapai 79,66% dari target Tahun 2022 sebesar Rp154.478.000.000,00. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode Tahun 2020-2024 sebesar Rp112.939.000.000,00 maka capaian nilai efisiensi pengeluaran negara/daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 telah tercapai 108,97%.

IKK “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” diukur dengan nilai pengurangan/pengalihan rencana belanja proyek/program/kegiatan yang tidak tepat.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah” dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Capaian Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah sebesar Rp123.064.570.000,00 merupakan hasil dari penugasan evaluasi Perencanaan dan Penganggaran, berupa temuan potensi tidak efektif dan tidak efisien yang dilakukan pada tiga Pemerintah Daerah.

4) IKK: Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebesar Rp0,00

Target IKK “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah” pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp99.430.000.000,00. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 belum ada target maupun realisasi.

IKK “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah” diukur dengan nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara/daerah termasuk denda dari hasil pengawasan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta dan nilai aset yang dipulihkan.

Perbandingan target dan realisasi “Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



5) IKK: Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target

Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sejumlah 0 PSN

Target IKK “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target” pada Tahun 2022 adalah sebanyak 1 PSN. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 belum ada target maupun realisasi. IKK “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target” diukur dengan jumlah PSN yang tercapai target atas total jumlah PSN yang dilakukan pengawasan.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Tercapai Sesuai Target” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



6) IKK: Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan

Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebesar 0,00 %

Target IKK “Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan” pada Tahun 2022 adalah sebesar 85,00%. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 belum ada target maupun realisasi. Belum terdapat realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2022.

Hambatan kelancaran pembangunan (HKP) adalah sebuah kondisi dimana proses pembangunan tidak dapat mencapai *output*, *outcome* dan manfaat yang ditetapkan karena adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait. IKK Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan diukur dengan jumlah laporan evaluasi hasil kelancaran pembangun (LEHKP) yang kesepakatnya terlaksana dibagi dengan total penugasan EHKP yang diterbitkan.

Perbandingan target dan realisasi “Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



7) IKK: Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik

Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sejumlah 0

Target IKK “Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik” pada Tahun 2022 adalah sejumlah 1 BUMN. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 belum ada target maupun realisasi. Belum terdapat realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2022. IKK Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik, pengukurannya dari jumlah BUMN yang tata kelolanya baik dari kegiatan *Assessment Good Corporate Governance*.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah BUMN dengan Pengelolaan Korporasinya Baik” dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



8) IKK: Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat

Jumlah BUMD dengan kinerja sehat sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebanyak 0 BUMD

Target IKK “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” pada Tahun 2022 sebanyak 11 BUMD. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 belum ada target maupun realisasi.

IKK “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” diukur dari jumlah BUMD dengan kinerja sehat dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun assessor lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori “Sehat”

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



9) IKK: Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat.

Jumlah BLUD dengan kinerja sehat sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebanyak 0 BLUD

Target IKK “Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat” pada Tahun 2022 sebanyak 1 BLUD. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 belum ada target maupun realisasi.

IKK “Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat” diukur dari jumlah BLUD dengan kinerja sehat dari hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP ataupun assessor lainnya berdasarkan kriteria penilaian mencapai kategori “Sehat”.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



10) IKK: Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan

Jumlah BUMDes yang mampu menyusun Laporan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebanyak 14 BUMDes

Target IKK “ Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan ” pada Tahun 2022 sebanyak 19 BUMDes, dan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebanyak 14 BUMDes. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 telah terealisasi sebanyak 14 BUMDes atau 100,00% dari Target sebanyak 14

BUMDes, dan telah tercapai 73,68% dari target Tahun 2022 sebanyak 19 BUMDes. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode Tahun 2020-2024 sebanyak 26 BUMDes maka capaian “Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan” sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 telah tercapai 53,85%.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan Keuangan” dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



11) IKK: Presentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 100%

Target IKK “ Presentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti” pada Tahun 2022 adalah 100%, dan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebesar 100%. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 telah terealisasi sebesar 100% dari target sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 maupun

target Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra periode Tahun 2020-2024 sebesar 100 % maka capaian “Presentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti” sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 telah tercapai 100%.

Pengawasan BPKP Bidang Investigasi yang bersifat represif dalam konteks untuk pengendalian korupsi meliputi pelaksanaan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN), pemberian keterangan ahli. IKK“ Presentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti” diukur dengan jumlah KLPBU/APH yang menindaklanjuti rekomendasi jumlah penugasan pengawasan dibagi dengan jumlah pengawasan represif.

Capaian 100 % merupakan tindak lanjut berupa Pemberian Keterangan Ahli (PKA) di Hadapan Penyidik atas Perkara Dugaan Tipikor atas *Jasa Fullboard Meeting* pada suatu unit kerja.

Perbandingan target dan realisasi “ Presentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti” dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



12) IKK : Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti

Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebesar 0,00%

Target IKK “Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti” pada Tahun 2022 sebesar 80,00%. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 belum ada target maupun realisasi

Kinerja efektivitas hasil pengawasan ini diukur dengan menghitung hasil pengawasan edukatif dan preventif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti dengan penugasan pengawasan preventif/edukatif yang telah dilaksanakan.

Perbandingan target dan realisasi “Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



13) IKK: Jumlah Pemda menindak lanjuti Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK

Jumlah Pemda menindak lanjuti Area Of Improvement dari hasil pengukuran EPK Triwulan I Tahun 2022 sebanyak 0 Pemda

Target IKK “Jumlah Pemda menindak lanjuti Areas Of Improvement dari hasil pengukuran EPK” pada Tahun 2022 sebanyak 1 Pemda. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 belum ada target maupun realisasi. IKK ini merupakan IKK baru yang muncul di Tahun 2022 sehingga belum ada target di akhir periode renstra Tahun 2020-2024.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah Pemda menindak lanjuti Areas Of Improvement dari hasil pengukuran EPK” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



14) IKK: Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Jumlah APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebanyak 1 APIP

Target IKK “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” pada Tahun 2022 sebanyak 1 APIP. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 telah mencapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun akhir renstra tahun 2020-2024 sebanyak 1 APIP. Capaian Kapabilitas APIP \geq Level 3 berdasarkan SP-2388/D3/01/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan menggunakan pedoman Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kapabilitas APIP dan belum dilakukan evaluasi kembali menggunakan pedoman yang baru yaitu Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/D.

Jika dibandingkan dengan target periode akhir renstra Tahun 2020 – 2024 telah tercapai 100%.

IKK Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 diukur berdasarkan hasil penetapan level kapabilitas APIP dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP. Target dan realisasi IKK Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 bersifat kumulatif.

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



15) IKK: Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3

Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebanyak 11 APIP

Target IKK “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” pada Tahun 2022 sebanyak 11 APIP. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 telah mencapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun akhir renstra tahun 2020-2024 sebanyak 11 APIP. Capaian tersebut berdasarkan penilaian

dengan pedoman Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kapabilitas APIP dan belum dilakukan evaluasi kembali menggunakan pedoman yang baru yaitu Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/D.

IKK Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 diukur berdasarkan hasil penetapan level kapabilitas APIP dari hasil evaluasi yang

dilaksanakan oleh BPKP. Target dan realisasi IKK Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 bersifat kumulatif.

Capaian sasaran kegiatan APIP Kabupaten/Kota yang sudah mencapai Kapabilitas APIP level 3 sebagai berikut:

No	Nama APIP	Level	Status
2	Inspektorat Kabupaten Sleman	L3	SP-1917/D3/01/2018, tanggal 21 November 2018
3	Inspektorat Kabupaten Purworejo	L3	SP-745/D3/01/2019, tanggal 14 Mei 2019
4	Inspektorat Kabupaten Kulon Progo	L3	SP-1127/D3/04/2019 tanggal 29 Juli 2019
5	Inspektorat Kabupaten Cilacap	L3	SP-1584/D3/04/2019 tanggal 27 September 2019
6	Inspektorat Kabupaten Magelang	L3	SP-1934/D3/04/2019 tanggal 16 Oktober 2019
7	Inspektorat Kabupaten Gunungkidul	L3	SP-1935/D3/04/2019 tanggal 16 Oktober 2019
8	Inspektorat Kota Yogyakarta	L3	SP-2569/D3/04/2019 tanggal 27 Desember 2019
9	Inspektorat Kabupaten Bantul	L3	SP-2551/D3/04/2019 tanggal 27 Desember 2019
10	Inspektorat Kota Magelang	L3	SP-2600/D3/04/2019 tanggal 27 Desember 2019
11	Inspektorat Kabupaten Klaten	L3	SP-2601/D3/04/2019 tanggal 27 Desember 2019
12	Inspektorat Kabupaten Kebumen	L3	SP-899/D3/04/2021 tanggal 29 Desember 2021

Perbandingan target dan realisasi “Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



16) IKK: Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebanyak 1 Provinsi

Target IKK “Jumlah APIP Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” pada Tahun 2022 sebanyak 1 Provinsi. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 telah mencapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun akhir renstra tahun 2020-2024 sebanyak 1 Provinsi. Capaian Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sebanyak 1 Provinsi dengan menggunakan penilaian Maturitas SPIP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 maupun menggunakan pedoman baru yaitu Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah. Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemda D.I. Yogyakarta berdasarkan Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2021. IKK Jumlah Provinsi dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 diukur berdasarkan hasil penetapan level Maturitas SPIP dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP. Target dan realisasi IKK Jumlah Provinsi dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 bersifat kumulatif. Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



17) IKK: Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3

Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebanyak 11 Kabupaten/Kota

Target IKK "Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3" pada Tahun 2022 sebanyak 11 Kabupaten/Kota. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 telah mencapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun akhir renstra tahun 2020-2024 sebanyak 11 Kabupaten/Kota.

Capaian Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 sebanyak 11 Kabupaten/Kota dengan menggunakan dengan penilaian Maturitas SPIP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016.

IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 diukur berdasarkan hasil penetapan level Maturitas SPIP dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP. Target dan realisasi IKK Jumlah Kabupaten/Kota dengan dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 bersifat kumulatif.

Perbandingan target dan realisasi IKK "Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3" dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



Namun demikian berdasarkan Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2021 dengan menggunakan pedoman terbaru yaitu Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah, jumlah kabupaten/kota Pemerintah Daerah dengan Maturitas SPIP Terintegrasi \geq Level 3 sebanyak 4 kabupaten/kota yaitu:

- Kabupaten Sleman

- Kabupaten Bantul
- Kota Yogyakarta
- Kabupaten Cilacap

18) IKK: Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3

Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3 sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebanyak 1 Provinsi

Target IKK “Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3” pada Tahun 2022 sebanyak 1 Provinsi. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 telah mencapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun akhir renstra tahun 2020-2024 sebanyak 1 Provinsi. Capaian tersebut berdasarkan berdasarkan Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2021 dimana nilai skor MRI pada Provinsi D.I. Yogyakarta sebesar 3,20.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



19) IKK: Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3

Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebanyak 0 Kabupaten/Kota

Target IKK “Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3” pada Tahun 2022 sebanyak 3 Kabupaten/Kota. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 belum ada target maupun realisasi.

Perkembangan IKK “Jumlah Pemda Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



20) IKK: Prosentase Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Prosentase desa yang menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebesar 0,00%

Target IKK “Prosentase Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa pada Tahun 2022 sebesar 100,00%, dan sampai dengan triwulan I Tahun 2022 sebesar 50,00 %.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 belum ada realisasi desa yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa karena belum ada informasi data yang diperoleh.

Perbandingan target dan realisasi Prosentase Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



21) IKK: Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes

Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebanyak 3 APIP

Target IKK “Jumlah APIP yang mengimplementasikan Siswaskeudes pada Tahun 2022 sebanyak 4 APIP. Sampai dengan Triwulan I 2022 telah tercapai 3 APIP atau 75,00% dari target tahun 2022 sebanyak 4 APIP, dan tercapai 50,00% dari target renstra 2020-2024 sebesar 6 APIP. APIP yang telah mengimplementasikan siswaskeudes yaitu Inspektorat Kabupaten Bantul, Inspektorat Kabupaten Purworejo dan Inspektorat Kabupaten Klaten. Selain itu pada Inspektorat Kabupaten Kulon Progo telah dilakukan bimtek implementasi Siswaskeudes pada Bulan Januari 2022.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



22) IKK: Prosentase Pemda yang akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah

Prosentase Pemda yang Akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebesar 0,00%

Target IKK “Prosentase Pemda yang akuntabel dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah pada Tahun 2022 sebesar 66,67%. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 belum terdapat target maupun realisasi.

Pemda yang akuntabel (efisien dan efektif) dalam pengelolaan keuangan dan kinerja tercermin dari Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB. Indikator jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang memperoleh

Opini LKPD WTP dan nilai evaluasi SAKIP minimal BB. Sampai dengan triwulan I Tahun 2022 opini LKPD Tahun 2021 dan nilai evaluasi SAKIP tahun 2021 belum diumumkan.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Prosentase Pemda yang Akuntabel Dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



23) IKK: Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai

Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebanyak 50 Desa

Target IKK “Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai pada Tahun 2022 sebanyak 135 desa, dan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebanyak 25 desa. Sampai dengan Triwulan I 2022 jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai sejumlah 50 desa atau

tercapai sebesar 200,00 % dari target di triwulan I sebesar 25 desa. Jika dibandingkan dengan target Tahun 2022 telah tercapai 37,04 % dari target sebesar 135 desa, sedangkan jika dibandingkan dengan target renstra 2020-2024 telah tercapai 9,78 % dari target sebesar 511 desa.

Pengelolaan aset desa memadai diukur dari pengujian atas pengendalian intern tata kelola aset desa. Target dan realisasi Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai bersifat kumulatif

Capaian tersebut adalah berdasarkan hasil evaluasi tata kelola dan akuntabilitas asset desa sebagai berikut:

No	Kabupaten	Jumlah Desa
Evaluasi Tahun 2021		
1	Kabupaten Kulon Progo	8
2	Kabupaten Sleman	11
3	Kabupaten Gunungkidul	21
Evaluasi Tahun 2022		
4	Kabupaten Gunungkidul	10
	Jumlah	50

Perbandingan target dan realisasi IKK “Jumlah Desa yang Menerapkan Aset Desa Secara Memadai” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



24) IKK: Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3

Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebanyak 0 BLUD

Target IKK “Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 pada Tahun 2022 sebanyak 4 BLUD. Belum ada target maupun realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2022.

IKK Jumlah BLUD dengan MRI \geq level 3 diukur dengan Jumlah BLUD yang mengimplementasikan pengelolaan/ manajemen risiko.

Perbandingan Target dan Realisasi IKK “Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



b. Pendukung Pengawasan

Sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja Tahun 2022, Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mempunyai 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan (IKK) dengan capaian kinerja diuraikan sebagai berikut:

1) IKK: Nilai Zona Integritas Unit Kerja

Nilai Zona Integritas Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebesar 0,00

Target IKK “Nilai Zona Integritas Unit Kerja sebesar 90,00. Belum ada target maupun realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2022.

Nilai Skor Zona Integritas diukur sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB.

Target dan realisasi IKK “Nilai Zona Integritas” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



2) IKK: Skor IKPA Unit Kerja

Skor IKPA Unit Kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebesar 0

Target IKK “Skor IKPA Unit Kerja sebesar 95,00. Belum ada target maupun realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2022. Skor IKPA diukur dengan skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Skor IKPA Unit Kerja” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



3) IKK: Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP

Persentase penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2022 sebesar 100%

Target IKK “Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP” pada Tahun 2022 sebesar 100,00%. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 capaian telah tercapai 100,00% dari target Tahun 2022 maupun target akhir renstra periode 2020-2024 sebesar 100,00%. Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2021 dengan Nomor: LAP-18/PW12/1/2022 tanggal 7 Februari 2022 disusun sesuai SAP (PP 71 Tahun 2010).

Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP diukur dengan jumlah Laporan Keuangan yang sesuai kriteria SAP dibagi Laporan Keuangan yang terbit dikalikan 100%.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



4) IKK: Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2022 sebesar 0

Target IKK “Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja” pada Tahun 2022 sebesar 80,00. Belum ada target maupun realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2022.

Pengelolaan BMN diukur berdasarkan hasil penilaian mandiri yang divalidasi oleh Biro Umum BPKP.

Target dan realisasi “Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



5) IKK: Nilai SAKIP Unit Kerja

Nilai SAKIP Unit Kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2022 sebesar 0

Target IKK “Nilai SAKIP Unit Kerja” pada Tahun 2022 sebesar 87,00. Belum ada target maupun realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2022.

Nilai SAKIP diukur dengan hasil *Self Assesment* SAKIP yang telah dilakukan *Quality Assurance* (QA) oleh Inspektorat BPKP. Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Eselon II dengan perencanaan strategis unit di bawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

Target dan realisasi IKK “Nilai SAKIP Unit Kerja” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



6) IKK: Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)

Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja) Perwakilan D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2022 sebesar 0%

Target IKK “Persentase Penyelesaian RTP” pada Tahun 2022 sebesar 100,00%. Belum ada target maupun realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2022.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) unit kerja dihitung berdasarkan jumlah RTP yang diselesaikan dibagi dengan jumlah RTP dikali 100%. Penilaian ini digunakan dalam rangka menilai penerapan manajemen risiko pada unit kerja. Berdasarkan aplikasi yang digunakan oleh unit kerja yaitu Bewise.

Perbandingan target dan realisasi capaian IKK “Persentase Penyelesaian RTP” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



7) IKK: Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)

Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2022 sebesar 0%

Target IKK “Persentase Efektivitas Pengendalian Intern” pada Tahun 2022 sebesar 65,00%. Belum ada target maupun realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2022.

Efektivitas pengendalian intern dihitung dengan perhitungan (Jumlah pengendalian eksisting yang efektif +

Jumlah RTP yang selesai dan efektif) / (Jumlah seluruh pengendalian eksisting + Jumlah RTP yang Selesai) x 100%.

Perbandingan target dan realisasi capaian IKK “Persentase Penyelesaian RTP” dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



8) IKK: Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja

Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja Perwakilan BPKP D.I. sampai dengan Triwulan 1 Tahun 2022 sebesar 0

Target IKK “Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja” pada Tahun 2022 sebesar 75. Belum ada target maupun realisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2022.

Indeks kepuasan layanan unit kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta diukur dengan hasil survey kepada para mitra di lingkungan unit kerja.

Perbandingan target dan realisasi IKK “Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja” dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:



Rincian target dan realisasi *outcome* sesuai Perjanjian Kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 pada Lampiran 1.

2. Pelaksanaan APP dan APPD

a. Pelaksanaan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahun 2022

- Topik Pengawasan dalam Perjajian Kinerja APP Tahun 2022

Berdasarkan perjanjian kinerja APP Tahun 2022, pada Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mempunyai target APP sebanyak 65 Topik Pengawasan dan target sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebanyak 12 Topik Pengawasan. Setiap Topik Pengawasan yang telah terbit laporan hasil pengawasan harus dibuat Sintesa Hasil Pengawasan (SHP).

Target dan Realisasi Topik Pengawasan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sesuai perjanjian kinerja sebagai berikut:

No	Target APP = Topik Pengawasan	Realisasi	Bidwas	Keterangan
1	Bantuan Operasional Sekolah	sudah	IPP	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
2	Penanganan Covid-19 (Vaksinasi)	Sudah	IPP	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
3	Penanganan Covid-19 (Pembayaran Rumah Sakit Klaim)	Sudah	AN	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
4	Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya)	Sudah	IPP	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
5	Peningkatan Kualitas dan Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	Sudah	APD	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
6	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Sudah	APD	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
7	Pemanfaatan APBD untuk PC-PEN (termasuk TKDD)	Sudah	APD	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
8	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa (Perencanaan)	Sudah	APD	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
9	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa (Akuntabilitas)	Sudah	APD	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
10	Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa	Sudah	APD	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik

No	Target APP = Topik Pengawasan	Realisasi	Bidwas	Keterangan
11	Kemudahan Perizinan (OSS)	Belum	APD	Berdasarkan aplikasi Monsima di TW II
12	P3DN (fokus pada Industri Kesehatan Industri Energi, Industri Jasa Konstruksi dan 10 K/L dengan anggaran terbesar)	Belum	IPP	Berdasarkan aplikasi Monsima di TW II

Namun terdapat realisasi APP sebanyak 7 topik pengawasan yang tidak ditargetkan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Topik Pengawasan	Bidwas	Keterangan
1	Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah)	IPP	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
2	Pencegahan Kecurangan	Investigasi	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
3	Respon Kecurangan	Investigasi	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
4	Kartu Indonesia Pintar	IPP	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
5	SPIP	P3A	Belum SHP
6	Kapabilitas APIP	P3A	Belum SHP
7	Pengembangan Potensi Desa	AN	Belum SHP

- Topik Pengawasan yang Tidak Ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja APP 2022

Terdapat 4 topik pengawasan yang sudah dilaksanakan dan telah terbit laporan hasil pengawasan yang tidak ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Topik Pengawasan	Bidwas	Keterangan
1	Penanganan Covid-19-PBJ (Alat <i>Testing/Tracing</i> , Almatkes, Obat dan Faskes Penanganan Covid-19 (Vaksinasi))	APD	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik

No	Topik Pengawasan	Bidwas	Keterangan
2	Optimalisasi Pemanfaatan KPBU	IPP	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
3	Penempatan Dana	AN	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
4	Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan	IPP	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik

- Non Prioritas yang Tidak Ditargetkan Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Terdapat 5 Topik pengawasan kategori non prioritas yang sudah dilaksanakan dan sudah terbit laporan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Topik Pengawasan	Bidwas	Keterangan
1	Pengawasan terhadap Program <i>for Result</i> untuk <i>Disbursement Linked Indicators</i> (DLI) Program Reformasi Bantuan Sosial	IPP	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
2	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah	APD	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
3	Pengawasan Sisa Bos Tahun 2011 dan 2019 pada Pemerintah Daerah	APD	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
4	Kualitas Pengendalian Intern	AN	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
5	Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri; Evaluasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; <i>Verifikasi Disbursement Linked Indicators</i>	IPP	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik

- Dukungan Pengawasan yang Tidak Ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Terdapat 2 Topik pengawasan kategori Dukungan Pengawasan yang sudah dilaksanakan dan sudah terbit laporan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 sebagai berikut:

No	Topik Pengawasan	Bidwas	Keterangan
1	Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan (PAEP)	P3A	SHP sudah direviu/setujui Kepala Perwakilan namun belum ditanda tangan elektronik
2	Penerapan JFA pada APIP K/L/D	P3A	Belum SHP

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran 2

b. Pelaksanaan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) Tahun 2022

Berdasarkan perjanjian kinerja APPD Tahun 2022, pada Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mempunyai target APPD sebanyak dua topik dengan target di Triwulan IV yaitu:

No	Topik	Bidwas	Keterangan
1	Pengelolaan atas Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) Piyungan	IPP	Target TW IV
2	Pengawasan atas Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Wilayah DIY	APD	Target TW IV

Namun demikian berdasarkan aplikasi MONSIMA, jumlah APPD yang ada sebagai berikut:

No	Topik	Bidwas	Keterangan
1	Pengelolaan atas Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) Piyungan	IPP	Target PKPT II,III
2	Pengawasan atas Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Wilayah DIY	APD	Target PKPT II,III,IV
3	Pengembangan Kewirausahaan Baru untuk Pemulihan Ekonomi	IPP	Target PKPT IV

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 terhadap topik Pengelolaan atas Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) Piyungan, telah terealisasi satu penugasan berupa Survei Pendahuluan dan Penyusunan Panduan Teknis Pengawasan atas Pengelolaan Sampah Terpadu Piyungan D.I. Yogyakarta pada Perangkat Daerah/Organisasi/Satker Kementerian/Lembaga yang terkait di Wilayah Kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta dengan ST No ST-49/PW12/2/2022 tanggal 7

Februari 2022 dengan Laporan Nomor LPP- 03/PW12/IPP/2022 tanggal 25 Maret 2022.

Rincian lihat di Lampiran 3

3. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT) yang Mendukung Pencapaian *Outcome* dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

a. PKPT Tahun 2022

Realisasi PKPT Tahun 2022 s.d. Triwulan I Tahun 2022 berdasarkan data dari aplikasi MONSIMA sebanyak 30 PKPT atau 125,00% dari rencana di Triwulan 1 sebanyak 24 PKPT. Jika dibandingkan dengan rencana satu tahun, maka realisasi PKPT sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 tercapai 27,78 % dari total PKPT 108 PKPT. Rincian Realisasi PKPT sampai dengan Triwulan I tahun 2022 sebagai berikut:

No	Bidang	Target			Realisasi ^{*)}		Capaian (%)		
		Tahun 2022		S.d TW 1	S.d TW 1		s.d TW 1	Tahun 2022	
		PKPT	Lokus	PKPT	PKPT	Lokus	PKPT	PKPT	Lokus
1	IPP	56	105	9	11	20	122,22	19,64	19,05
2	APD	22	66	9	10	18	111,11	45,45	27,27
3	AN	21	45	3	4	5	133,33	19,05	11,11
4	Investigasi	5	30	2	2	5	100,00	40,00	16,67
5	P3A	4	15	1	3	6	300,00	75,00	40,00
Jumlah		108	261	24	30	54	125,00	27,78	20,69

Ket:

*) Realisasi PKPT mengacu pada penerbitan laporan

4. Penyerapan Anggaran

Realisasi anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2022 sebesar Rp6.003.468.574,00 atau 19,25% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp31.185.165.000,00 . Rincian realisasi pengawasan sebagai berikut:

- Realisasi anggaran Program Pengawasan Pembangunan s.d. Triwulan I Tahun 2022 sebesar Rp 116.607.662,00 atau 4,42% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 2.636.228.000,00.



- Realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen s.d. Triwulan I Tahun 2022 sebesar Rp 5.886.860.912,00 atau 20,62% dari anggaran Tahun 2022 sebesar Rp 28.548.937.000,00.



Rencana dan realisasi anggaran s.d. bulan Triwulan I Tahun 2022 secara rinci lihat di Lampiran 4.

5. Hal-hal yang perlu diperhatikan

Sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- Terdapat target Indikator Kinerja Kegiatan di akhir periode renstra 2020-2024 yang lebih kecil daripada target di Tahun 2022, karena belum ada informasi terkait revisi Renstra dari Biro MKOT.

- Terdapat IKK "Prosentase Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa" yang belum ada realisasi padahal sudah ada target sampai dengan TW 1 Tahun 2022 dikarenakan Bidang Pengampu (APD) belum memperoleh informasi terkait realisasi IKK tersebut.
- Penyerapan anggaran Program Pengawasan Pembangunan masih sangat kecil yaitu baru sebesar 4,42 % dari anggaran.
- Sintesa Hasil Pengawasan yang telah ditandatangani Kepala Perwakilan dan berbarcode belum terunggah ke SIMA-X.

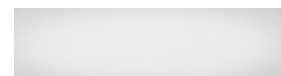
6. Usulan/Saran Perbaikan

Atas hal-hal yang perlu diperhatikan di atas, Kami menyampaikan usulan/saran sebagai berikut:

- Segera membuat revisi renstra dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Biro MKOT.
- Bidang APD selaku pengampu agar segera mencari data/informasi terkait realisasi IKK "Prosentase Desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa"
- Semua bidang pengawasan segera mempercepat penyerapan anggaran.
- Untuk SHP yang telah disetujui Kepala Perwakilan dan berbarcode agar diunggah ke SIMA-X.

Demikian kami sampaikan laporan kinerja Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta s.d. Triwulan I Tahun 2022. Atas perkenan Bapak Kepala Perwakilan, kami ucapkan terima kasih.

Korwas Bidang P3A,


Ratna/Wijihastuti

**Target dan Realisasi Outcome Sesuai Perjanjian Kinerja
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2022**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				Realisasi			
			Satuan	TW I Tahun 2022	2022	2024	TW I Tahun 2022	% Realisasi thd target TW I	% Realisasi thd target 2022	% Realisasi thd target 2024
1	2	3	4	5	6	6	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1.1 Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi	Rp (Juta)	-	701,00	1.029,00	-	-	-	-
		1.2 Potensi penerimaan daerah yang dioptimalisasi	Rp (Juta)	-	2.394,49	1.714,00	-	-	-	-
		1.3 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rp (Juta)	75.000,00	154.478,00	112.939,00	123.064,57	164,09	79,66	108,97
		1.4 Nilai penyelamatan keuangan Negara dan daerah	Rp (Juta)	-	99.430,00	103.964,00	-	-	-	-
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	2.1 Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target	PSN	-	1,00	1,00	-	-	-	-
		2.2 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	-	85,00	85,00	-	-	-	-
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	3.1 Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik	BUMN	-	1,00	1,00	-	-	-	-
		3.2 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	-	11,00	11,00	-	-	-	-
		3.3 Jumlah BLUD dengan kinerja sehat	BLUD	-	1,00	2,00	-	-	-	-
		3.4 Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan	BUMDes	14,00	19,00	26,00	14,00	100,00	73,68	53,85
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	4.1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4.2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	-	80,00	90,00	-	-	-	-
		4.3 Jumlah Pemda menindak lanjuti <i>Area Of Improvement</i> dari hasil pengukuran EPK	Pemda	-	1,00	-	-	-	-	-
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	5.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Prov	-	1,00	1,00	1,00	-	100,00	100,00
		5.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/kota	-	11,00	11,00	11,00	-	100,00	100,00
		5.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Prov	-	1,00	1,00	1,00	-	100,00	100,00
		5.4 Jumlah Kabupaten/kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/kota	-	11,00	11,00	11,00	-	100,00	100,00
		5.5 Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Prov	-	1,00	1,00	1,00	-	100,00	100,00
		5.6 Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/kota	-	3,00	8,00	-	-	-	-
		5.7 Persentase desa yang Menyusun laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	50,00	100,00	65,00	-	-	-	-

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target			Realisasi				
				Satuan	TW I Tahun 2022	2022	2024	TW I Tahun 2022	% Realisasi thd target TW I	% Realisasi thd target 2022	% Realisasi thd target 2024
1	2	3		4	5	6	6	5	6	7	8
		5.8	Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP		4,00	6,00	3,00		75,00	50,00
		5.9	Persentase Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Persen	-	66,67	75,00	-		-	-
		5.10	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25,00	135,00	511,00	50,00		37,04	9,78
		5.11	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	-	4,00	7,00	-	-	-	-
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	-	90,00	79,00	-	-	-	-
		6.2	Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	-	95,00	90,00	-	-	-	-
		6.3	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja Mandiri)	Persen	-	100,00	100,00	-	-	-	-
		6.4	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Nilai	-	80,00		-	-	-	-
		6.5	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	-	87,00	84,00	-	-	-	-
		6.6	Persentase Penyelesaian RTP (MR Unit Kerja)	Persen	-	100,00		-	-	-	-
		6.7	Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	-	65,00		-	-	-	-
		6.8	Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	-	75,00	81,00	-	-	-	-

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN

NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL/ BIDWAS	TARGET				Realisasi TW I (Laporan Hasil Pengawasan)	Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2022									
1	A.1.a.	Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional	204 (IPP)	-	√	-	-		
2	A.1.b.	Peningkatan Sarana-Prasarana Pendidikan	204 (IPP)	-	-	√	-		
3	A.1.c.	Bantuan Operasional Sekolah	204 (IPP)	√	-	-	-	√	SHP
4	A.1.d.	Program Indonesia Pintar (KIP dan KIP Kuliah)	204 (IPP)	-	√	-	-	√	SHP
5	A.1.e.	Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	204 (IPP)	-	√	-	-		
6	A.2.a.	Penanganan Covid-19 (Vaksinasi)	203 (IPP)	√	√	√	√	√	SHP
7		Penanganan Covid-19 (Pembayaran Klaim Rumah Sakit)	203 (IPP)	√	√	√	√	√	SHP
8	A.2.b.	Stunting	204 (IPP)	-	-	√	-		
9	A.2.d.	Reformasi Sistem Kesehatan (Kemandirian Industri Farmasi dan Almatkes)	201 (IPP)	-	-	-	√		
10		Reformasi Sistem Kesehatan (Layanan Primer)	203 (IPP)	-	-	-	√		
11		Reformasi Sistem Kesehatan (Layanan Rujukan)	203 (IPP)	-	-	-	√		
12		Reformasi Sistem Kesehatan (Kualitas dan Redistribusi Tenaga Kesehatan)	203 (IPP)	-	-	-	√		
13	A.3.a.	Peningkatan Tata Kelola Data Terpadu Penerima Manfaat Bantuan Pemerintah (DTKS dan Basis Data Terkait Lainnya)	203 (IPP)	√	-	-	-	√	SHP
14	A.3.c.	Implementasi Bansos APBN (PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)	203 (IPP)	-	√	-	-		
15	A.3.d.	Implementasi Bansos APBD	302 (APD)	-	√	-	-		
16	A.3.e.	Implementasi APBDesa	303 (APD)	-	√	-	-		
17	B.1.a.	Pembangunan Perumahan Rakyat (Perumahan Khusus dan Rumah Susun)	103	-	-	-	√		
18	B.1.b.	Infrastruktur SPAM	103	-	-	-	√		
19			405	-	-	-	√		
20	B.1.c.	Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)	103	-	-	-	√		
21	B.2.b.	Infrastruktur Jaringan Irigasi	103	-	-	√	-		
22	B.3.a.	Pembangunan Jalan	103	-	-	-	√		
23	B.3.b.	Pembangunan Jembatan	103	-	-	-	√		
24	B.3.c.	Infrastruktur Jalan Tol	103	-	-	-	√		
25	B.3.d.	Pembangunan Jalur Kereta Api (termasuk kereta cepat Jkt-Bdg)	103	-	-	-	√		
26	B.3.e.	Pembangunan Bandara	402	-	-	-	√		

NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL/ BIDWAS	TARGET				Realisasi TW I (Laporan Hasil Pengawasan)	Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
27	B.4.a.	Penyediaan BTS	204	-	-	√	-		
28	B.4.b.	Penyediaan Akses dan Kapasitas Jaringan Internet	204	-	-	√	-		
29	C.2.a.	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah	301	√	-	-	-	√	SHP
30	C.2.b.	Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	301	√	√	-	√	√	SHP
31	C.2.c.	Optimalisasi PAD	301	-	√	-	-		
32	C.2.d.	Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah Daerah melalui Ketepatan dan Efektivitas Dan transfer (fokus pada sektor pendidikan dasar dan menengah)	302	-	-	√	-		
33	C.2.f.	Pemanfaatan APBD untuk PC-Pen (termasuk TKDD)	302	√	√	√	√	√	SHP
34	C.3.a.	Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa (Perencanaan)	303	√	-	-	-	√	SHP
35		Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa (Akuntabilitas)	303	√	√	√	√	√	SHP
36	C.3.b.	Tata Kelola dan Akuntabilitas Aset Desa	303	√	-	-	-	√	SHP
37	C.4.a.	BUMN	401	-	-	√	-		
38	D.1.a.	Bantuan Pemerintah untuk Usaha Mikro	104	-	√	-	√		
39	D.1.b.	Fasilitasi Kredit Pemerintah untuk UMKM (KUR dan Non KUR, baik reguler maupun tambahan)	403	-	√	-	√		
40	D.3.b.	Kemudahan Perizinan (OSS)	302	√	-	-	-		Monsima TW 2
41	D.4.b.	P3DN (fokus pada Industri Kesehatan Industri Energi, Industri Jasa Konstruksi dan 10 K/L dengan anggaran terbesar)	104	√	-	-	-		Monsima TW 2
42	D.5.a.	Pengembangan DPSP	104	-	-	-	√		
43	D.5.b.	Bantuan Stimulus kepada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Masa Pandemi Covid-19	104	-	-	-	√		
44	E.1.a.	Tata Kelola Subsidi Pupuk	403	-	-	√	-		
45	E.1.b.	Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Pertanian)	102	-	-	√	-		
46		Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Desa dan APBD)	302	-	-	√	-		
47		Tata Kelola Program Benih Unggul (Padi) (Dana Kementerian Desa dan APBD)	303	-	-	√	-		
48	E.1.c.	Tata Kelola Program Bibit Ternak	102	-	-	√	-		
49		Tata Kelola Program Bibit Ternak (Dana Kemendes PDTT dan APBD)	302	-	-	√	-		
50			303	-	-	√	-		
51	E.2.a.	Dukungan Peralatan Produksi Pertanian	102	-	-	√	-		
52		Dukungan Peralatan Produksi Pertanian	302	-	-	√	-		
53		(Dana Kemendes PDTT dan APBD)	303	-	-	√	-		
54	E.2.b.	Dukungan Peralatan Produksi Perikanan	102	-	-	√	-		
55	E.3.c.	Infrastruktur Pelabuhan Perikanan	102	-	-	√	-		

NO	KODE TOPIK	TOPIK PENGAWASAN	UNIT KERJA RENDAL/ BIDWAS	TARGET				Realisasi TW I (Laporan Hasil Pengawasan)	Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
56		Infrastruktur Pelabuhan Perikanan (Pemda)	302	-	-	√	-		
57	E.5.a.	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah	401	-	-	√	-		
58	F.1.a.	Reformasi Birokrasi	205	-	-	√	-		
59	F.1.b.	SPIP	304	-	-	-	√	√	Belum SHP
60	F.1.c.	Kapabilitas APIP	304	-	-	-	√	√	Belum SHP
61	F.2.a.	Pencegahan Kecurangan	501	-	√	-	-	√	SHP
62	F.2.b.	Deteksi Kecurangan	502	-	√	-	-		
63	F.2.c.	Respon Kecurangan	503	-	√	-	-	√	SHP
64	G.2.b.	Kartu Sembako	203	-	-	√	-		
65	G.2.d.	Kartu Indonesia Pintar	302	-	-	√	-	√	SHP
66	G.3.c.	Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha	104	-	-	√	-		
67	G.3.e.	Optimalisasi Program Padat Karya	102	-	-	√	-		
68			103	-	-	√	-		
69	G.3.f.	Pengembangan Potensi Desa	303	-	-	√	-	√	Belum SHP
B. APP tidak ditargetkan dalam perjanjian Kinerja									
		Penanganan Covid-19-PBJ (Alat Testing/Tracing, Almatkes, Obat dan Faskes Penanganan Covid-19 (Vaksinasi)	APD	√	√	√	√	√	SHP
		Optimalisasi Pemanfaatan KPBU	IPP	√				√	SHP
		Penempatan Dana	AN	√				√	SHP
		Bantuan Tunai bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan	IPP	√	√			√	SHP
C. Non Prioritas tidak ditargetkan dalam perjanjian Kinerja									
		Pengawasan terhadap Program for Result untuk Disbursement Linked Indicators (DLI) Program Reformasi Bantuan Sosial	IPP	√				√	SHP
		Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah	APD	√				√	SHP
		Pengawasan Sisa Bos Tahun 2011 dan 2019 pada Pemerintah Daerah	APD	√				√	SHP
		Kualitas Pengendalian Intern	AN					√	Belum SHP
		Audit Keuangan atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri; Evaluasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; Verifikasi Disbursement Linked Indicators	IPP		√	√		√	Belum SHP
C. Dukungan Pengawasan tidak ditargetkan dalam perjanjian kinerja									
		Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Pengawasan (PAEP)	P3A	√	√	√	√	√	SHP
		Penerapan JFA pada APIP K/L/D	P3A		√	√		√	Belum SHP

TARGET DAN REALISSAI TAHUN 2022
PERWAKILAN BPKP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN DAERAH

NO	NAMA CLUSTER	TEMA PENGAWASAN	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TARGET PELAPORAN				Realisasi TW I (Laporan Hasil Pengawasan)	Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
A Perjanjian Kinerja Tahun 2022									
1	Pariwisata	Pengawasan atas Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Wilayah DIY	<p>1. Analisis desain/kebijakan atas Program Bantuan Keuangan Khusus Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan di Wilayah DIY.</p> <p>2. Analisis tata kelola, identifikasi risiko, serta permasalahan strategis Program Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan di Wilayah DIY.</p> <p>3. Analisis capaian kinerja, efektivitas, dan akuntabilitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan di Wilayah DIY.</p> <p>4. Analisis kinerja Program Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan di Wilayah DIY khususnya target tata ruang dan wilayah dan kebudayaan dihubungkan dengan dampak ke peningkatan pelayanan publik, pelestarian kekayaan budaya, pariwisata, dan ekonomi regional.</p> <p>5. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</p>				√		

NO	NAMA CLUSTER	TEMA PENGAWASAN	INFORMASI YANG DIHARAPKAN	TARGET PELAPORAN				Realisasi TW I (Laporan Hasil Pengawasan)	Keterangan
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
A Perjanjian Kinerja Tahun 2022									
2	Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas	Pengelolaan atas Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) Piyungan	<p>1. Analisis desain/kebijakan atas Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) Piyungan.</p> <p>2. Analisis tata kelola, identifikasi risiko, serta permasalahan strategis Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) Piyungan.</p> <p>3. Analisis capaian kinerja, epektifitas dan akuntabilitas Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) Piyungan..</p> <p>4. Analisis kinerja Pengelolaan Sampah Terpadu (PST) Piyungan dihubungkan dengan dampak terhadap penurunan pencemaran lingkungan, peningkatan aksesibilitas masyarakat ke kesehatan dasar dan peningkatan layanan dasar dan indikator kesehatan masyarakat.</p> <p>5. Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait.</p>				√	1	belum SHP
B APPD tidak ditargetkan dalam perjanjian Kinerja									
1	Stimulus dan Dukungan terhadap UMKM	Pengembangan Kewirausahaan Baru untuk Pemulihan Ekonomi	"Akuntabilitas keuangan dan capaian program pengembangan UMKM, Analisis peningkatan produktivitas UMKM terhadap pendapatan pelaku usaha UMKM dan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian regional (PDRB). Identifikasi hambatan dan permasalahan, Rekomendasi kebijakan strategis kepada pemangku kepentingan terkait				V		

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
Realisasi Penyerapan Anggaran
s.d. Maret 2022

No	Kode	Program/IKK	Anggaran		Realisasi s.d. Bulan Ini	% Capaian Penyerapan	
			Tahun 2022	s.d. Bulan Ini		Terhadap Anggaran 2022	Terhadap Rencana s.d. Bulan Ini
			(Rp)	(Rp)		(%)	(%)
1		2	3	4	5	6=5/3*100	7=5/4*100
A	089.01.CH	Program Pengawasan Pembangunan					
1	FAG.005	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan atas Program Pembangunan Regional	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
2	FAG.011	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengembangan JFA	21.731.000,00	1.605.000,00	1.430.000,00	6,58%	89,10%
3	FAG.012	Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut	80.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4	FAG.U02	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Daerah	218.561.000,00	49.450.000,00	11.730.000,00	5,37%	23,72%
5	FAG.U06	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha	34.878.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
6	FAG.U07	Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengendalian Korupsi	30.000.000,00	18.885.000,00	3.765.000,00	12,55%	19,94%
		Sub Jumlah Program A	485.170.000,00	89.940.000,00	16.925.000,00	3,49%	18,82%
B	089.01.CH	Program Pengawasan Pembangunan (ABT)					
1	UAG.U03	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan atas Program Prioritas Nasional yang Ditargetkan	1.960.419.000,00	135.555.000,00	99.682.662,00	5,08%	73,54%
2	UAG.U09	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	63.639.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	UAG.U10	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	127.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
		Sub Jumlah Program B	2.151.058.000,00	149.555.000,00	99.682.662,00	4,63%	66,65%
		Sub Jumlah Program Pengawasan	2.636.228.000,00	239.495.000,00	116.607.662,00	4,42%	48,69%
B	089.01.WA	Program Dukungan Manajemen					
1	3676.EBA.962	Layanan Umum	456.280.000,00	85.173.181,00	50.484.040,00	11,06%	59,27%
2	3676.EBA.994	Layanan Perkantoran	28.092.657.000,00	6.581.626.531,00	5.836.376.872,00	20,78%	88,68%
		Sub Jumlah Program B	28.548.937.000,00	6.666.799.712,00	5.886.860.912,00	20,62%	88,30%
		Total	31.185.165.000,00	6.906.294.712,00	6.003.468.574,00	19,25%	86,93%